

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PENCABULAN
ANAK DI BAWAH UMUR**

(Studi Putusan PN Kalianda Nomor 177/Pid.B/2020/PN.Kla)

SKRIPSI

Oleh

Umi Chabibatul Fitriyah

NIM. C03217029



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah & Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Umi Chabibatul Fitriyah
NIM : C03217029
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Publik Islam
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Putusan PN Kalianda Nomor 177/Pid.B/2020/PN.Kla)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Juli 2021

Saya yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a green and yellow revenue stamp. The stamp has the text 'METERAI TEMPEL', '6000', and 'RUPIAH' on it.

Umi Chabibatul Fitriyah
NIM. C03217029

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Umi Chabibatul Fitriyah NIM. C03217029 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 16 Juli 2021

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned above the printed name.

Dr. Priyo Handoko, SS, SH, M.Hum

NIP. 196602122007011049

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Umi Chabibatul Fitriyah NIM C03217029 ini telah di pertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Kamis, 29 Juli 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi

penguji I,



Dr. Priyo Handoko, S.S., S.H., M.Hum
NIP. 196602122007011049

penguji II,


Dr. Mahir, M.Fil.I

NIP.197212042007011027

penguji III,


Mon. Hatta, S.Ag., M.HI

NIP. 197110262007011012

penguji IV,


Abdul Haris Fitri Anto, S.Psi., M.Si

NIP.198506242020121003

Surabaya, 29 Juli 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP.195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Umi Chabibatul Fitriyah
NIM : C03217029
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam
E-mail address : umichabibatulf24@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP SANKSI

TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Putusan PN

Kalianda Nomor 177/Pid.B/2020/PN.K1a)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 04 Oktober 2021

Penulis

()
Umi Chabibatul Fitriyah

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian tentang “Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Putusan PN Kalianda Nomor 177/Pid.B/2020/PN.Kla)”, yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan: *pertama*, bagaimana pertimbangan hakim terhadap sanksi tindak pidana pencabulan anak di bawah umur pada Putusan Nomor 177/Pid.B/2020/PN.Kla. *kedua*, bagaimana tinjauan hukum pidana islam dan hukum positif terhadap sanksi tindak pidana pencabulan anak di bawah umur Putusan Nomor 177/Pid.B/2020/PN.Kla.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Kemudian dianalisis dengan analisis silogisme dengan menganalisis hukum dalam kenyataan (*in concreto*) dalam hal ini adalah putusan hakim dengan hukum yang abstrak (*in abstracto*) yaitu peraturan perundang-undangan untuk diambil suatu kesimpulan

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa penjatuhan sanksi pidana oleh hakim Pengadilan Negeri Kalianda tidak sesuai dengan ketentuan batas minimum yang telah ditentukan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, sehingga putusan hakim bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Majelis hakim mempertimbangkan adanya ketentuan mengenai dimungkinkannya untuk menjatuhkan pidana di bawah minimum Undang-undang yaitu dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam rumusan pleno kamar pidana pada poin kelima tentang penjatuhan pidana minimal terhadap tindak pidana anak dan orang dewasa tetapi korbannya adalah anak, bahwa apabila pelakunya sudah dewasa sedangkan korbannya adalah anak maka dilihat secara kasuistik majelis hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimum dengan pertimbangan khusus. Kemudian, ditinjau dari hukum pidana islam, keputusan hakim tersebut sudah sesuai dengan hukum islam, karena dalam islam pencabulan dikategorikan dalam jarimah ta'zir dimana kadar sanksi jarimah ta'zir tidak ditentukan secara pasti dalam nash, akan tetapi penjatuhan hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa).

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka dalam menjatuhkan hukuman sebaiknya hakim mempertimbangkan dari segala aspek yang terkait, serta untuk lebih mengedepankan pada kemaslahatan. Sehingga pada akhirnya putusan yang dikeluarkan oleh hakim benar-benar mencerminkan nilai keadilan. Dan dalam kasus ini dapat memberikan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat agar menjaga dan melindungi anak sebagai generasi penerus bangsa.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian	13
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR.....	24
A. Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur.....	24
1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan	24
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencabulan	27
3. Kategori Usia Anak.....	33
4. Penjatuhan Pidana Minimal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak dan Orang Dewasa Tetapi Korbannya Anak.....	36
B. Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak dalam Hukum Positif Indonesia.....	38
1. Sanksi Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana	38

2. Sanksi Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak dalam Undang-undang Perlindungan Anak.....	38
C. Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak dalam Hukum Pidana Islam.....	40
1. Pengertian Jarimah.....	40
2. Pengertian Jarimah Ta'zir.....	42
3. Macam-macam Sanksi Jarimah Ta'zir.....	45
BAB III DESKRIPSI KASUS TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KALIANDA NOMOR: 177/Pid.B/2020/PN.Kla	55
A. Kasus Posisi.....	55
B. Tuntutan Jaksa.....	66
C. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	67
D. Pertimbangan Hakim.....	68
E. Dasar Hukum Hakim.....	74
F. Amar Putusan.....	79
BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KALIANDA NOMOR: 177/Pid.B/2020/PN.Kla TENTANG PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR	81
A. Pertimbangan Hakim terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur pada Putusan Nomor 177/Pid.B/2020/PN.Kla	81
B. Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur pada Putusan Nomor 177/Pid.B/2020/PN.Kla	87
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95
BIODATA PENULIS.....	105

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi muda yang berperan sebagai salah satu sumber daya manusia yang berpotensi dan akan menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Oleh karenanya anak perlu dihindarkan dari perbuatan pidana yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, maupun rohaninya. Dengan demikian maka perlu diberikan perlindungan kepada anak. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 21 ayat 1 dijelaskan bahwa: “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental”.¹ Ketentuan Undang-undang tersebut menegaskan bahwa negara yang terdiri dari masyarakat dan pemerintah wajib melindungi hak-hak anak dan menjamin keamanan serta kesejahteraan anak.

1

Berkaitan dengan kejahatan yang melanggar kesusilaan, yaitu perbuatan yang melanggar adab kebiasaan yang baik dan berhubungan erat dengan seksual atau nafsu birahi khususnya mengenai kelamin (seks) seseorang. Apabila seseorang melakukan perbuatan pidana lain yang berhubungan dengan kontak fisik terkait pelanggaran kesusilaan terhadap korbannya maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan “cabul” atau “pencabulan”.

Undang-Undang Republik Indonesia, *Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak*

Kejahatan dapat muncul kapan saja dan di mana saja. Salah satu kasus yang sering terjadi saat ini dan memerlukan perhatian khusus adalah kasus pencabulan anak di bawah umur, yang merupakan salah satu tindak pidana pelecehan seksual yang dapat menimbulkan beban trauma yang sangat serius pada anak.⁴ Kejahatan kesusilaan seperti pencabulan tidak hanya terjadi pada orang dewasa tetapi juga pada anak. Anak sebagai korban pencabulan secara langsung maupun tidak langsung akan mengalami penderitaan, baik secara fisik maupun mental sebagai akibat dari peristiwa tersebut. Oleh karenanya sangat diperlukan adanya peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan untuk melindungi hak-hak anak.

pidana pelecehan seksual yang dapat menimbulkan beban trauma yang sangat serius pada anak.⁴ Kejahatan kesusilaan seperti pencabulan hanya terjadi pada orang dewasa tetapi juga pada anak. Anak sebagai korban pencabulan secara langsung maupun tidak langsung mengalami penderitaan, baik secara fisik maupun mental sebagai akibat dari peristiwa tersebut. Oleh karenanya sangat diperlukanya peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan untuk melindungi hak-hak anak.

Hukum Positif Indonesia telah mengatur mengenai tindak pidana kesusilaan dalam hal pencabulan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XIV Pasal 289 sampai Pasal 296. Berikut b

⁴ Sri Wijiyati, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur”, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 4. No. 1, (2018), 90.

menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.⁵

Seiring perkembangan zaman kasus pencabulan terhadap anak semakin marak terjadi sehingga menjadi perhatian masyarakat luas, oleh karenanya pemerintah secara khusus membuat peraturan perundang-undangan untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 82 Ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016, yang berbunyi: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.⁶

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 82 Ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016, ancaman bagi pelaku pencabulan terhadap anak dengan melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan

⁵ Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁶ Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan sanksi zina dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nuur ayat 2:

الرَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ
فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَتَهُمَا عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ
الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. (Q.S. an-Nuur (24):2)

[illegible]

Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan dalam latar belakang di atas, di mana hakim memutuskan sanksi bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan sanksi di bawah minimum Undang-undang, maka penulis akan mengkaji mengenai pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pada putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 177/Pid.B/2020/PN.Kla serta tinjauan dalam hukum pidana islam.

Karenanya penulis tertarik untuk menjadikan perkara tersebut sebagai skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum

[illegible]

1. Identifikasi Masalah

a. Sanksi tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang

b. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap kasus tindak pidana pencabulan anak di bawah umur pada putusan Nomor 177/Pid.B/2020/PN.Kla

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan agar permasalahan ini bisa dikaji dengan baik, maka penulis membatasi ruang lingkup penulisan karya ilmiah yang akan dikaji dengan batasan:

- Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap sanksi tindak pidana pencabulan anak di bawah umur pada putusan Nomor 177/Pid.B/2020/PN.Kla?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam dan hukum positif terhadap sanksi tindak pidana pencabulan anak di bawah umur putusan Nomor 177/Pid.B/2020/PN.Kla?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas yang menginformasikan kepada pembaca tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah

Oleh karenanya penulis telah melakukan kajian terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dalam beberapa penelitian yang sudah ada sebelumnya. Skripsi yang penulis bahas sangat berbeda dari skripsi yang sudah ada. Hal ini dapat dilihat dari hasil pencarian penulis di Digilib UIN Sunan Ampel Surabaya menunjukkan bahwa kajian yang memiliki topik ini sejauh yang penulis ketahui sampai saat ini belum ditemukan, namun beberapa skripsi mempunyai tema yang sama. Beberapa skripsi yang dapat penulis jumpai antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Evi Oktavia Intan Y, 2018, berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Sanksi di Bawah Ketentuan Undang-undang Putusan Nomor : 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht Tentang Pencabulan Anak di Bawah Umur”.

Penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi tindak pidana pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap anak di bawah umur di mana sanksi yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak seharusnya

Penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi tindak pidana pencabulan oleh terdakwa kepada anak di bawah umur di mana latar belakang anak korban tersebut adalah anak yang berkebutuhan khusus dalam putusan Nomor 512/Pid.B/2014/PN.Sda. penelitian ini mengkaji tentang dasar pertimbangan hakim yang lebih memilih menerapkan pasal 290 ayat 2 KUHP dibanding menerapkan asas *lex specialis derogat lex generalis* dalam pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ikfina Aesya Rahmah, 2019, berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur Dalam Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN.Psr”.

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji dalam putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 177/Pid.B/2020/PN.Kla, sebab dalam putusan tersebut hakim memutuskan untuk memilih dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang di mana dalam pasal tersebut berbunyi: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

[illegible]

tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan meninjau segi Hukum Pidana Islam. Sedangkan letak persamaan dengan terdahulu yaitu sama-sama mengkaji mengenai kasus kejahatan kesu yaitu tindak pidana pencabulan anak di bawah umur.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap sanksi tindak

tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan meninjau segi Hukum Pidana Islam. Sedangkan letak persamaan dengan terdahulu yaitu sama-sama mengkaji mengenai kasus kejahatan kesu yaitu tindak pidana pencabulan anak di bawah umur.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap sanksi tindak

tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan meninjau segi Hukum Pidana Islam. Sedangkan letak persamaan dengan terdahulu yaitu sama-sama mengkaji mengenai kasus kejahatan kesu yaitu tindak pidana pencabulan anak di bawah umur.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap sanksi tindak

- tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan meninjau segi Hukum Pidana Islam. Sedangkan letak persamaan dengan terdahulu yaitu sama-sama mengkaji mengenai kasus kejahatan kesu yaitu tindak pidana pencabulan anak di bawah umur.
- E. Tujuan Penelitian**
- Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap sanksi tindak

F. Kegunaan Hasil Penelitian

hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan kegunaan sekurang-kurangnya dua aspek sebagai berikut:

1. Aspek Keilmuan (teoritis)

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman atau referensi dan sumbangsih pengetahuan guna menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang Hukum pidana Islam, terutama di Fakultas Syariah & Hukum.

2. Aspek Terapan (praktis)

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi dan acuan bagi seluruh masyarakat, pejabat, maupun instansi khususnya aparat penegak hukum utamanya hakim guna menangani kasus kejahatan kesusilaan anak di bawah umur demi terciptanya kepastian hukum dan terjamin pula keadilan dan kemanfaatan hukum.

G. Definisi Operasional

Demi mempermudah dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, penulis akan menjelaskan beberapa istilah atau kata dalam judul sebagai berikut:

1. Hukum Pidana Islam

15

Metode penelitian merupakan langkah yang dimiliki peneliti dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menganalisis data yang telah dikumpulkan kemudian ditafsirkan.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), 41-42.

¹² Ibid., 69-70.

mud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, 158.

[illegible]

Untuk menjawab rumusan masalah kedua peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. penelitian ini biasanya menggunakan bahan hukum yang diperoleh dari perpustakaan baik dari sumber yang berupa buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya. Penelitian ini dilakukan dengan menentukan topik, eksplorasi informasi, menentukan fokus penelitian, mengumpulkan sumber bahan hukum, persiapan penyajian bahan hukum, dan penyusunan laporan.

a. Data primer adalah data tentang tindak pidana pencabulan dalam Putusan Nomor 177/Pid.B/2020/PN.Kla.

[illegible]

[illegible]

- 1) Abdul Rahman, dkk. “Analisis Terhadap Putusan yang Menjatuhkan Sanksi Pidana di Bawah Minimal (Studi Putusan Nomor: 284/Pid.sus/2017/PN.Kka)”. Vol. 2. Agustus, 2020.
- 2) Sri Wijiyati. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur”. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 4, No.1. 2018.
- 3) Sri Wijiyati. “Penerapan Asas Legalitas dalam Kasus Penanganan Pencabulan Anak Di Bawah Umur”. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*. Vol. 5. No. 1. Juni, 2019.
- 4) David Casidi Silitonga dan Muaz Zul. “Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai)”. *jurnal Mercatoria*, Vol. 7 No. 1 (Juni, 2014).
- 5) Abdurrahman Al-Maliki. *Sistem Sanksi dalam Islam*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, 181).

a. *Classifying* (klasifikasi bahan hukum) merupakan kegiatan mengklasifikasikan bahan hukum yang telah diperoleh sesuai dengan bahan hukum yang relevan dengan isu hukum dalam penelitian. Dalam hal ini mengenai pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 177/Pid.B/2020/PN.Kla serta analisis Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pencabulan anak di bawah umur.

b. *Editing* (pemeriksaan bahan hukum) merupakan kegiatan memeriksa dan mengoreksi kembali bahan hukum yang telah diperoleh agar apabila terdapat bahan hukum yang masih kurang, dapat dilengkapi dan diperbaiki agar menghilangkan keraguan dalam bahan hukum dan memperbaiki kualitas bahan hukum.

- c. *Analyzing* (analisis bahan hukum) merupakan kegiatan yang dilakukan setelah pemeriksaan bahan hukum, dalam hal ini

d. *Concluding* (kesimpulan) merupakan langkah terakhir dalam proses pengolahan bahan hukum. Tujuannya yaitu untuk menjawab rumusan masalah yang sudah dikemukakan peneliti.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan analisis silogisme. Silogisme yaitu suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Silogisme disusun dari dua pernyataan dan sebuah kesimpulan. Sebagian para ahli logika menyebut silogisme sebagai penyimpulan tidak langsung, karena dalam silogisme menyimpulkan pengetahuan baru yang kebenarannya diambil secara sintesis.¹⁷ Yang dimaksud deduksi silogisme dalam hal ini adalah untuk merumuskan fakta hukum dengan cara membuat konklusi atau premis mayor dan premis minor.¹⁸ Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa analisis silogisme adalah menganalisis hukum dalam kenyataan (*in concreto*) dalam hal ini adalah putusan hakim dengan hukum yang abstrak (*in abstracto*) yaitu peraturan

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), 89.

Bab kesatu yaitu pendahuluan yang berisi sub bab latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian

penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu memuat landasan teori terkait tindak pidana pencabulan anak di bawah umur menurut Hukum Positif Indonesia serta Hukum Pidana Islam

Bab ketiga yaitu memuat tentang deskripsi kasus pada putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 177/Pid.B/2020/PN.Kla tentang pencabulan anak di bawah umur. Pembahasan dalam bab ini meliputi: (1) kasus posisi, (2) tuntutan Jaksa, (3) dakwaan Jaksa, (4) dasar hukum hakim, (5) pertimbangan hakim, dan (6) amar putusan.

Bab keempat yaitu menganalisis ketentuan sanksi di bawah minimum Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif dalam putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 177/Pid.B/2020/PN.Kla.

Bab kelima merupakan penutup, memuat tentang kesimpulan yang berisi jawaban atas rumusan masalah serta saran-saran.

TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR

1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Menurut simons, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁹

24

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan.²³ Pencabulan berasal dari kata “cabul” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan,

²³ Ibid., 67.

Jadi tindak pidana pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesopanan yang berhubungan dengan seksual atau nafsu birahi (kelamin) seperti meraba-raba payudara, meraba-raba kelamin, berciuman dan sebagainya.

Hukum Positif Indonesia telah mengatur mengenai kejahatan kesusilaan dalam hal pencabulan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bab XIV Pasal 289 sampai Pasal 296. Selain itu ada pula Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang juga mengatur mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak, yang mana ancaman pidananya yaitu paling lama 15 (lima belas) tahun. Ancaman sanksinya sangat besar, hal ini diharapkan dapat menekan tingginya angka pencabulan yang dilakukan terhadap anak. Namun seiring berkembangnya waktu, ancaman sanksi ini dirasa kurang dapat memberikan ancaman bagi para pelaku, oleh karenanya pada tahun 2016 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian disahkan menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor

[illegible]

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencabulan

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana antara lain sebagai berikut:

²⁵ David Casidi Silitonga, Muaz Zul, “Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai)”, *jurnal Mercatoria*, Vol. 7 No. 1 (Juni, 2014), 65.

Begitu pula dengan tindak pidana pencabulan, untuk dapat menjerat dan menghukum seseorang dengan peraturan atau undang-undang mengenai pencabulan, kita harus membuktikan terlebih dahulu apakah orang tersebut terbukti melakukan pencabulan dan unsur-unsur tindak pidana pencabulan yang diatur dalam undang-undang telah terpenuhi atau tidak.

Unsur tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur terdapat dalam Pasal 290 ayat 2 KUHP yang berbunyi: “barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin”.²⁶

Kandungan unsur-unsur pencabulan dalam pasal di atas sebagai berikut:

- a. Barangsiapa, yang berarti subjek atau perseorangan yang secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana dan orang tersebut mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya
- b. Melakukan perbuatan cabul, yang berarti melakukan perbuatan yang tidak patut dan melanggar norma kesusilaan, kesopanan

²⁶ Tim Pustaka Buana, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (Pustaka Buana, 2016), 709.

c. Dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin. Yang berarti pelaku mengetahui bahwa korban yang dicabuli umurnya kurang dari 15 (lima belas) tahun atau belum jelas, atau belum dapat dikawini.

Selain itu terdapat pula dalam aturan khusus di luar KUHP yaitu Pasal 81 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang yang berbunyi: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah)”.²⁷ Dalam Pasal 76D sendiri dijelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.²⁸ Serta dalam Pasal

²⁸ Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- a. **Setiap orang**, yang berarti orang perseorangan atau korporasi
- b. **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak**, dalam unsur ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka tidak ada kewajiban untuk mempertimbangkan sub-unsur lainnya dan unsur ini dapat dinyatakan terbukti. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, berarti dalam prosesnya dilakukan perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau kerusakan fisik atau barang orang lain. Memaksa, berarti ada suatu paksaan dari

[illegible]

3. Kategori Usia Anak

³⁰ Shovia Hasanah, “Pelaku Persetubuhan karena Suka Sama Suka, Bisakah Dituntut?”, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50692e475ef42/persetubuhan-anak-dibawah-18-tahun-dengan-orang-dewasa/>, “diakses pada”, 4 Juli 2021.

Usia sangat penting untuk diketahui karena merupakan tolak ukur status seseorang, dan seseorang bisa dikatakan sebagai anak dapat dilihat dari usianya. Kategori batas usia anak pada berbagai peraturan Perundang-undangan di Indonesia sangat beragam dan setiap Undang-undang memiliki definisi masing-masing yang tentunya berbeda satu sama lain.

Menurut KUHP Pasal 45, didefinisikan orang yang belum dewasa yaitu sebelum umur 16 (enam belas) tahun.³¹

Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47, didefinisikan anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.³²

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3, angka 4, angka 5 didefinisikan sebagai berikut:³³

Angka 3, Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

³² Undang-undang Republik Indonesia, *Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

[illegible]

Angka 5, Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Dalam hukum islam terdapat istilah “baligh” yang berarti dewasa, seseorang yang sudah dewasa disebut baligh. Dalam fikih, baligh berarti seseorang yang sudah dewasa secara fisik seperti menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. Apabila keadaan ini tidak terjadi, maka baligh bisa ditandai dengan sampainya seseorang pada usia 15 tahun menurut pendapat madzhab Syafi’i.³⁵ Terdapat pula istilah *ar rusyd* yang secara bahasa berarti akal, pikiran

³⁵ Nurkholis, “Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-undang dan Hukum Islam”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8 No. 1 (Juni, 2017), 82.

4. Penjatuhan Pidana Minimal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak dan Orang Dewasa Tetapi Korbannya Anak

Dalam surat edaran tersebut dijelaskan pada rumusan pleno kamar pidana poin kelima tentang penjatuhan pidana minimal terhadap pelaku tindak pidana anak dan orang dewasa tetapi korbannya adalah

[illegible]

- a. Ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara pelaku/keluarga pelaku dengan korban/keluarga korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka.
- b. Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif, dan rasa keadilan.

Dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 di atas, majelis hakim dapat menjadikan dasar pertimbangan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara pidana anak.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana mencantumkan sanksi mengenai kejahatan terhadap kesusilaan dalam Bab XIV. Dan dalam hal pencabulan terhadap anak di bawah umur terdapat pada Pasal 290 angka 2 KUHP yang berbunyi: “barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin”.³⁷

Selain itu terdapat pula dalam Pasal 290 angka 3 yang berbunyi: “barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain”.³⁸

³⁷ Tim Pustaka Buana, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (Pustaka Buana, 2016), 709.

[illegible]

Tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 82 Ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016, yang berbunyi: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.³⁹

Nomor 17 Tahun 2016, ancaman bagi pelaku pencabulan anak dengan melakukan kekerasan, atau ancaman memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan suap, kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau melakukan perbuatan cabul adalah pidana penjara minimal 10 (sepuluh) tahun.

Undang-undang Republik Indonesia, *Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.*

[illegible]

1. Pengertian Jarimah

Secara umum jarimah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu jarimah yang diancam dengan *had* (bentuk *jama'* dari kata *had* adalah *hudud*) dan jarimah yang diancam dengan pidana *ta'zir*.

Berdasarkan penjelasan di atas, pembagian jenis jarimah atau tindak pidana dalam hukum pidana islam didasarkan pada jenis sanksi yang diancamkan, yang dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Jarimah hudud

Jarimah *hudud* adalah pidana yang telah ditentukan secara jelas dan tegas di dalam *nash* (baik berupa Al-Quran maupun As Sunnah) mengenai jenisnya, derat ringannya maupun cara pelaksanaannya.⁴⁰ Beberapa perbuatan yang dikualifikasikan sebagai jarimah *hudud* yaitu, zina, *qodzaf* (menuduh orang lain

[illegible]

b. Jarimah ta'zir

Namun ada pula yang membedakan jarimah menjadi 3 (tiga) macam yaitu jarimah *hudud*, jarimah *qishosh*, dan jarimah *ta'zir*. Oleh karena sanksi jarimah *qishosh* maupun *diyat* (pengganti jarimah *qishosh*) yang diancamkan terhadap jarimah *qishosh* telah ditentukan batas-batasnya dalam *nash* Al-Quran maupun As Sunnah, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana *qishosh* sesungguhnya termasuk dalam kualifikasi sebagai jarimah *hudud*, karena sanksi pidananya telah ditentukan secara jelas dan tegas dalam *nash* Al-Quran maupun As Sunnah. Dalam jarimah

[illegible]

2. Pengertian Jarimah Ta'zir

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ فِي تِهْمَةٍ

Ta'zir telah disyari'atkan bagi setiap (pelanggaran) yang *syara'* yang tidak menetapkan ukurannya. Sedangkan pelanggaran yang telah ditetapkan sanksinya oleh *syara'*, maka pelanggaran tersebut dijatuhi sanksi yang telah ditetapkan kadarnya oleh *syara'*. Semua

⁴³ Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 239.

Adapun pelanggaran-pelanggaran yang termasuk dalam kategori *ta'zir* sangat beragam dan banyak. Realitas kehidupan yang berkembang berakibat pada munculnya berbagai kejahatan yang belum pernah dijumpai sebelumnya dan semakin kompleks. Dikarenakan *ta'zir* merupakan jarimah yang belum ditetapkan ukuran sanksinya oleh *syara'*, maka penetapan kejahatan yang dapat diklasifikasikan dalam jarimah *ta'zir* didasarkan pada status sanksi atas kasus-kasus sejenis yang memang telah diklasifikasikan jenis kasusnya, kemudian kasus yang mungkin bisa dimasukkan ke dalamnya dimasukkan, jika tidak mungkin, maka lebih baik diserahkan kepada kebijakan *qadliyy*. Jenis kejahatan atau pelanggaran yang dapat dikategorikan dalam jarimah *ta'zir* ada 7 (tujuh) yaitu:⁴⁵

- [illegible]

⁴⁵ Ibid., 284.

a. Setiap orang yang berusaha melakukan zina dengan perempuan, atau berusaha melakukan homoseksual dengan laki-laki, namun tidak sampai melakukan dosa besar (berzina/homoseksual), seandainya tidak sampai melakukan kejahatan tersebut (zina/homoseksual), maka ia akan diberi sanksi penjara selama 3 tahun, ditambah dengan jilid dan pengusiran. Jika korban kejahatan (pencabulan itu) adalah orang yang berada di bawah kendalinya, seperti pembantu perempuan atau pembantu laki-lakinya, atau pegawai laki-laki atau perempuan yang ia miliki, atau yang lain, maka bagi pelaku akan dikenakan sanksi yang paling maksimal. Baik laki-laki maupun wanita yang melakukan perbuatan tersebut akan dikenakan sanksi yang sama, jika melakukannya tanpa paksaan.

- b. Barangsiapa memujuk dengan harta atau dijanjikan akan dinikahi, atau dengan bujukan lainnya, kemudian ia menggauli wanita itu, seperti layaknya menggauli istrinya, serta melakukan perbuatan seperti halnya perbuatan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya (kecuali bersetubuh) maka akan dikenakan sanksi penjara sampai 4 tahun lamanya. Siapa saja yang melakukan hal tersebut

[illegible]

c. Setiap orang yang bercumbu rayu dan bersenda gurau sambil tidur (berduaan) baik laki-laki maupun perempuan (tapi tidak sampai melakukan jima'), maka akan dikenakan sanksi penjara hingga 4 tahun. Barangsiapa melakukan perbuatan tersebut dengan mahramnya, maka akan dikenakan sanksi penjara 10 tahun, ditambah hukuman jilid, dan akan diasingkan. Jika tidak sampai terlena dan tidur, maka hanya akan dikenakan sanksi penjara selama 2 tahun. Dan orang yang dicumbuinya akan dikenakan sanksi serupa, yakni dipenjara selama 2 tahun jika terbukti melayani ajakan tersangka.

[illegible]

وَأَنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا اللَّهُ

Di samping adanya perintah untuk menjatuhkan hukuman dengan sanksi-sanksi yang telah ditentukan dalam *nash* baik Al-Quran maupun As Sunnah, ijtihad seorang penguasa dalam masalah *ta'zir* dibatasi hanya pada ukurannya saja, bukan pada sanksi yang hendak ia tetapkan (sebagai sanksi). Maka keberadaan *syari'* yang telah

[illegible]

Mengenai sanksi-sanksi yang telah digunakan *syari'* (sebagai hukuman), sebagai berikut:⁴⁸

Penguasa boleh menjatuhkan sanksi hukuman mati dalam *ta'zir*. Sanksi ini merupakan hukuman paling tinggi dalam *ta'zir*. Kejahatan-kejahatan yang penetapan ukuran sanksinya diserahkan kepada imam atau penguasa, maka imam harus menjatuhkan bentuk (dan ukuran) sanksi yang memenuhi syarat pencegahan. Jika ia menjatuhkan sanksi, dan melihat bahwa sanksi tersebut bukanlah pencegah, maka ia wajib menjatuhkan sanksi yang lebih berat dari sanksi tersebut, hingga terwujud aspek pencegahan.

Jilid yaitu memukul dengan cambuk, atau dengan alat sejenis.

Sanksi jilid disebutkan dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman:

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera. (QS. an-Nur [24]:2)

[illegible]

Pemenjaraan secara *syari* adalah menghalangi atau melarang seseorang untuk mengatur dirinya sendiri, baik itu dilakukan di dalam negeri, rumah, masjid, di dalam penjara, atau tempat-tempat lain. Pemenjaraan di masa Rasulullah SAW dilakukan di dalam rumah atau masjid. Demikian pula pada masa khalifah, di masa itu penjara dilakukan di dalam rumah, dibangun dari kayu (pohon), ada pula yang terbuat dari tanah liat yang keras. Pemenjaraan merupakan bagian dari sanksi, seperti halnya jilid dan potong tangan. Sanksi tersebut harus memberikan “rasa sakit” yang sangat kepada orang yang dipenjara. Juga harus bisa menjadi sanksi yang bisa berfungsi mencegah. Penjara dijadikan sebuah sekolah untuk pengajaran, namun bukan berarti sama seperti sekolah pada umumnya. Karena penjara merupakan tempat untuk menjatuhkan sanksi bagi orang yang melakukan kejahatan, maka sanksi penjara harus bisa menjadi sanksi yang dapat mencegah. Oleh karenanya penjara dibangun dengan ruangan, lorong-lorong yang berbeda dengan bangunan sekolah pada umumnya. Penjara dibangun sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut, ruangnya hendaknya dibuat remang-remang baik saat siang ataupun malam. Di dalam ruangan tidak boleh ada tempat tidur dan tikar. Ia harus merasakan kesepian, ketakutan dan lain-lain. Makanannya pun berupa makanan yang kasar dan sedikit. Meskipun demikian makanannya tetap harus yang cukup dengan

kebutuhan nutrisi dan kelangsungan hidupnya. Selain itu, tidak boleh ada yang membesuknya, kecuali kerabat dan tetangganya, itupun dengan waktu yang ditentukan.

Bagi para narapidana, tidak dibolehkan keluar dari penjara kecuali karena hajat dan mendapatkan ijin dari kepala penjara. Ia juga tidak boleh dipukuli, dibiarkan kehausan, diikat, dan dihina kecuali ada ketetapan dari *qadli* (hakim) yang menyatakan hal tersebut. Jika diperlukan tindakan untuk memperberat atau memperingan hukuman di penjara, maka tindakan itu juga harus dilakukan oleh *qadli* karena ia adalah pihak yang memberi ketetapan sesuai dengan apa yang ia ketahui.

Pemberian hukuman dengan pemenjaraan juga memiliki banyak macam, semuanya disesuaikan dengan kejahatan-kejahatan yang dilanggar seseorang. Mengenai jenis pemenjaraannya, ditetapkan oleh *qadli*. Setiap perbuatan tercela dipandang sebagai kejahatan penilaian besar kecilnya kejahatan dikembalikan kepada imam, ia yang berhak menetapkan. Namun dalam hal penetapan jenis sanksi, seorang *qadli* diperbolehkan menjatuhkan sanksi yang lebih berat kepada seseorang yang melakukan kejahatan. Misalnya, boleh memenjarakan seseorang selama 1 tahun, dan memberi sanksi penjara 1 minggu kepada orang yang lain untuk kejahatan yang sama. Semua didasarkan pada pengetahuan *qadli* tentang kedua orang tersebut. Apakah ia

Orang yang dipenjara memiliki status yang berbeda, ada yang disebut narapidana adapula yang disebut tahanan. Narapidana ialah orang yang ditahan atau dipenjara sebab sudah terbukti melakukan kejahatan. sedangkan tahanan ialah orang yang ditahan karena suatu tuduhan. Meskipun sama-sama dipenjara, tapi orang yang berstatus tahanan harus ditempatkan di tempat yang lebih ringan dari penjara dan batas waktu penahanannya harus dibatasi sependek mungkin, dan jika harus diperpanjang masa penahannya, harus melalui ketetapan *qadliy*. Jika tidak ada pembaruan masa penahannya maka ia harus dibebaskan jika masa penahannya telah berakhir dan tidak boleh dipersulit.

[illegible]

d. Ghuramah

[illegible]

Nasa'iy menambahkan di akhir hadits:

وَمَا لَمْ يُبْلَغْ ثَمَنَ الْمَجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةٌ مِثْلِيهِ وَجَلَدَاتٌ لِكَالِ

Demikian pula, *ta'zir* bagi orang yang tidak mau membayar

zakat adalah dengan mengambil hartanya. Semua ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW telah menjatuhkan sanksi ganti rugi pada kasus *ta'zir*. Dan selama tidak dijelaskan batas ganti ruginya, maka penetapan kadar ganti ruginya diserahkan kepada imam atau diserahkan kepada *qadliyy* jika imam tidak menetapkan kadarnya. Jika seorang *qadliyy* telah menetapkan sanksi tertentu, maka ia tidak boleh membatalkannya. Dalam hal ganti rugi, denda harus diambil dari harta yang ada padanya, jika ada. Jika tidak ada maka ditunggu sampai ia memiliki harta, baru kemudian ganti rugi tersebut diserahkan kepada negara.

[illegible]

f. Tahdid ash-Shadiq

[illegible]

**DESKRIPSI KASUS TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK
DI BAWAH UMUR DALAM PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI KALIANDA NOMOR: 177/Pid.B/2020/PN.Kla**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Pekerjaan : Buruh

[illegible]

1. Pada pertengahan bulan Februari tahun 2020, terdakwa dengan anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri berpacaran. Lalu pada hari sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa menjemput anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri di depan gang rumah anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri di dusun Tanjung Sari II, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, dimana sebelumnya sudah janji untuk bertemu. Kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Supra Fit warna hitam Nomor Polisi BE 8107 BJ membawa anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri menuju *flyover* Tol Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar. Setelah terdakwa dan anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri mengobrol sembari duduk di atas sepeda motor lalu pergi, dalam perjalanan anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri bertanya di mana rumah terdakwa, dijawab terdakwa di Desa Krawang Sari. Kemudian terdakwa dan anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri bersepakat untuk main ke rumah terdakwa di Dusun Talang Sawo, Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung selatan. Saat tiba di rumah terdakwa sekitar pukul 21.00 WIB, saat itu terdakwa dan anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri sempat duduk di bawah pohon yang berada di depan rumah, tidak lama kemudian terdakwa mengajak masuk anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri ke dalam rumah, kemudian masuk ke dalam kamar terdakwa. Setelah berada di dalam

2. Keesokan harinya, hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri saat duduk di bawah pohon yang berada di depan rumah terdakwa lalu anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri minta kepada terdakwa untuk diantarkan pulang, namun terdakwa mengatakan bahwa motornya tidak ada. Tidak lama kemudian datang adik terdakwa yang bernama Abdul bersama ibu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Supra Fit warna hitam Nomor Polisi BE 8107 BJ. Saat itu ibu terdakwa sempat menanyakan kepada adik terdakwa yang bernama Abdul siapakah wanita yang berada di samping terdakwa, setelah itu terdakwa mengantarkan anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri pulang ke rumahnya sekitar pukul 11.00 WIB, namun terdakwa

Kemudian terdakwa mengajak anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri ke *flyover* lalu dalam perjalanan terdakwa mengajak anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri melakukan persetubuhan. Lalu anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri mengiyakan ajakan terdakwa. Sekitar pukul 12.00 WIB, terdakwa dan anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri singgah di sebuah gubuk di dekat *flyover* Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung selatan. Selanjutnya beberapa saat kemudian terdakwa meraba-raba payudara anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri lalu terdakwa menarik tangan anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri untuk memegang kemaluan terdakwa hingga kemaluan terdakwa tegang. Setelah itu terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanannya ke dalam kemaluan anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri sehingga kemaluan anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri mengeluarkan cairan. Setelah itu terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalamnya dan anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri juga menurunkan celana panjang dan celana dalamnya.

Selanjutnya terdakwa menindih tubuh anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri yang telentang pada amben gubuk, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri kemudian menggoyang-goyangkannya selama kurang lebih dua menit hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sprema, lalu ditumpahkan ke tanah. Setelah itu terdakwa dan anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri merapikan pakaiannya masing-masing, kemudian terdakwa mengajak anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri untuk pergi ke rumah teman terdakwa yang berada di Kampung Baru. Setibanya di tempat tersebut, ternyata teman terdakwa tidak ada, kemudian terdakwa dan anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri kembali ke rumah terdakwa.

4. Setelah itu terdakwa mengajak anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri masuk ke dalam kamar lalu terdakwa dan anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri berciuman sembari tangan terdakwa meraba-raba payudara anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri setelah itu terdakwa dan anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri tertidur hingga pukul 15.30 WIB. Ketika terdakwa bangun melihat anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri masih tertidur lalu terdakwa membangunkannya dan mengajaknya pulang. Selanjutnya terdakwa mengantarkan anak

depan gang.

- pemeriksaan sebagaimana mestinya.

Terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan. Untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, telah dihadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan sebagai berikut:

Anak saksi Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri lahir pada tanggal 31 Oktober 2005 dan ia berpacaran dengan terdakwa yang dikenalnya melalui *Facebook*. Anak saksi Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini,

dalam berita acara tersebut anak saksi menyebutkan bahwa ia telah disetubuhi oleh terdakwa adalah tidak benar, karena yang benar adalah terdakwa hanya mencium, meraba payudara dan memegang kemaluan anak saksi Syafitri Oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa menjemput anak saksi di rumahnya di Dusun Tanjung Sari II, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan pergi mengendarai sepeda motor Supra Fit warna Hitam Nomor Polisi BE 8107 BJ menuju *flyover* tol di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan untuk nongkrong-nongkrong. Kemudian anak saksi ingin tahu di mana rumah terdakwa, dan terdakwa bersama anak saksi pergi ke rumahnya di Dusun Talang Sawo, Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dan tiba sekitar pukul 21.00 WIB. Bahwa saat di rumah terdakwa, terdakwa bersama anak saksi sempat menonton video porno sehingga terangsang. Lalu terdakwa mengajak anak saksi masuk ke dalam kamar dan berciuman sambil tangan terdakwa meraba payudara anak saksi namun tidak berlanjut karena tiba-tiba adik terdakwa masuk ke dalam rumah, sedangkan orang tua terdakwa pada malam itu tidak terlihat ada di rumah. Pada pukul 22.00 WIB anak saksi meminta untuk diantarkan pulang ke rumah kepada terdakwa, namun karena ban sepeda motor terdakwa kempes akhirnya anak

saksi menginap di rumah terdakwa. Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu 23 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB anak saksi diantarkan pulang oleh terdakwa, namun hanya sampai di depan gang rumahnya karena takut dimarahi oleh orang tua anak saksi. Bahwa tidak lama kemudian, anak saksi Syafitri Oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri kembali menemui terdakwa di depan gang rumahnya lalu kembali jalan ke arah *flyover* tol di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dan istirahat di gubuk yang tidak jauh dari *flyover* tersebut. Pada saat berada di gubuk, terdakwa meraba payudara anak saksi Syafitri Oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri lalu terdakwa memegang kemaluan anak saksi. Begitu juga dengan anak saksi memegang kemaluan terdakwa. Bahwa anak saksi dan terdakwa tidak melakukan persetubuhan. Bahwa setelah itu anak saksi dan terdakwa pulang ke rumah terdakwa. Pada saat di rumah, terdakwa dan anak saksi berciuman sembari tangan terdakwa meraba payudara anak saksi sehingga mereka tertidur sampai sore hari. Bahwa selanjutnya anak saksi diantarkan pulang ke rumahnya oleh terdakwa, namun hanya sampai di depan gang rumahnya karena takut dimarahi orang tuanya. Pada saat di rumah, anak saksi ditanya oleh orang tuanya Syamsul Hasan Basri Bin Hasanudin mengapa anak saksi tidak pulang ke rumah pada malam sebelumnya dan anak saksi mengatakan bahwa ia menginap di rumah terdakwa. Bahwa pada

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Talang Sawo, Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Saksi M Ridwan Bin Nawawi yang sedang bermain game bersama adik terdakwa melongok ke kamar dan melihat terdakwa berciuman sampil berpelukan dengan anak saksi Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri. Selama berada di rumah tersebut sampai pagi, saksi M Ridwan Bin Nawawi tidak melihat kejadian lain selain berpelukan dan berciuman tersebut. Dan terhadap keterangan saksi M Ridwan Bin Nawawi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

d. Saksi IV: Mat Juani Bin Mastur

1. Menyatakan terdakwa Khoirul Anwar Bin Mat Juani telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan cabul terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang dalam dakwaan alternatif kedua
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) kaos warna pink
 - b. 1 (satu) buah celana panjang jeans pria warna biru
 - c. 1 (satu) buah celana dalam pria warna hijau

Berdasarkan kasus di atas, Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan dakwaan dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- Berdasarkan kasus di atas, Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan dakwaan dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:
1. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

1. Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya.
2. Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk kategori *mala in se* atau *mala prohibita* yang merupakan serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan “luka” berupa disharmoni sosial pada masyarakat. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat kejahatan itu. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni sosialnya terganggu oleh kejahatan tadi.

3. Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya.
4. Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Dalam hal ini terdakwa melakukan tindakan **mencium, meraba payudara , memegang kemaluan, yang dilakukan atas dasar suka sama suka karena antara terdakwa dengan korban telah berpacaran dan mereka menonton film porno sehingga sama-sama terangsang.**
5. Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

ditetapkan dalam Undang-undang. Keber
khusus tidak dapat dipisahkan dari hak
pada umumnya, sebab pidana minimum I
dari pidana dan pemidanaan.

- Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung
sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
Rumusan Hukum Kamar Pidana, angka 5 tentang
Pidana Minimal terhadap pelaku tindak pidana anak dan
tetapi korbannya anak, huruf b, ditentukan bahwa apabila
sudah dewasa, sedangkan korbannya anak, maka
kasuistik, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana

- a. Ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara pelaku/keluarga pelaku dengan korban/keluarga korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka. Hal tersebut tidak berlaku apabila perbuatan dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/tiri, guru terhadap anak didiknya;
 - b. Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif, dan rasa keadilan.
8. Menimbang, bahwa terkait syarat pertama, menurut Majelis Hakim syarat tersebut terdiri dari dua bagian yang bersifat alternatif. Pertama, ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara pelaku/keluarga pelaku dengan korban/keluarga korban, dengan tidak saling menuntut, bahkan sudah menikah antara pelaku dengan korban **atau** perbuatan dilakukan suka sama suka. Dilihat dari peristiwa yang terjadi dalam perkara ini, dengan terdakwa melakukan tindakan mencium, meraba payudara, memegang kemaluan, yang dilakukan atas dasar suka sama suka karena antara terdakwa dengan korban telah berpacaran dan mereka menonton film porno sehingga sama-sama terangsang. Maka dengan fakta tersebut Majelis Hakim berpendirian bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi kriteria sebagai perbuatan yang dilakukan secara suka sama suka. Sedangkan dalam konteks perdamaian, meskipun di antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban belum ada perdamaian secara tertulis, tetapi dalam persidangan

9. Menimbang, bahwa dengan melihat usia terdakwa dan korban serta pola pergaulan di antara keduanya, Majelis Hakim berpendirian bahwa pemidanaan bukan merupakan satu-satunya solusi untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian, dengan memperhatikan perbuatan terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan terdakwa dan adil baik bagi terdakwa maupun korban, yang selengkapnyanya tercantum dalam amar putusan.

[illegible]

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat karena merusak moral masyarakat secara luas;

- Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan akibat psikologis bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

E. Dasar Hukum Hakim

Berdasarkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan, dan bahwasanya Jaksa Penuntut Umum telah memberikan dakwaan berupa dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim berhak memilih berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Majelis Hakim memutuskan untuk langsung memilih dakwaan alternatif kedua dari dakwaan alternatif yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang

1. Unsur “Setiap orang”

Bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang telah didakwa adalah orang yang bernama **Khoirul Anwar Bin Mat Juani**. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa **Khoirul Anwar Bin Mat Juani** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka unsur “setiap orang” telah terpanuhi.

Bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah

Bahwa unsur ini berhubungan dengan unsur ke-3 (ketiga) yaitu unsur “Untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul”. Oleh karenanya harus dipertimbangkan apakah tindakan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak tersebut ditujukan kepada anak, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

⁵⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), 261.

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, di dapatkan fakta-fakta hukum bahwa terdakwa dan anak Syafitri Oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri berciuman sambil tangan terdakwa meraba payudara anak saksi, dan tindakan terdakwa memegang kemaluan anak saksi. Begitu juga dengan anak saksi Syafitri Oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri memegang kemaluan terdakwa tersebut **adalah merupakan perbuatan cabul** karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) dalam ruang lingkup nafsu birahi kelamin. Sedangkan tindakan terdakwa yang mengajak anak saksi Syafitri Oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri menonton video porno, menurut majelis hakim tindakan tersebut **merupakan tindakan membujuk** karena tindakan tersebut dilakukan untuk membuat anak saksi terangsang hingga mau dicium, dipegang payudara dan kemaluannya.

[illegible]

Dengan terpenuhinya sub-unsur “membujuk” maka sub-unsur lainnya “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan”, “memaksa”, “melakukan tipu muslihat”, “melakukan serangkaian kebohongan”, tidak harus dibuktikan lagi dan dengan demikian unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memekasa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak” telah terpenuhi.

- Bahwa pada saat mempertimbangkan unsur kedua Majelis Hakim telah berpendirian bahwa terdakwa telah melakukan tindakan **membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.**

1. Menyatakan terdakwa Khairul Anwar Bin Mat Juani telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan cabul terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Khairul Anwar Bin Mat Juani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) kaos warna pink;

OMOR: 177/Pid.B/2020/PN.Kla TENTANG PENCAB

ANAK DI BAWAH UMUR

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pe

Anak di Bawah Umur pada Putusan Nomor 177/Pid.B/2020/

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang

perkara pidana dengan Putusan Nomor 177/Pid.B/20

menjatuhkan putusan kepada terdakwa Khoirul Anwar bin Mat J

berumur 20 (dua puluh) tahun telah melakukan tindak pidana p

terhadap korban Syafitri Oktaviani binti Syamsul Hasan B

berumur 15 (lima belas) tahun, dan terbukti secara sah

memenuhi unsur-unsur dari Pasal 82 ayat 1 Undang-undang

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur pada Putusan Nomor 177/Pid.B/2020/PN.Kla

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan Putusan Nomor 177/Pid.B/2020/PN.Kla menjatuhkan putusan kepada terdakwa Khoirul Anwar bin Mat Juani yang berumur 20 (dua puluh) tahun telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap korban Syafitri Oktaviani binti Syamsul Hasan Basri yang berumur 15 (lima belas) tahun, dan terbukti secara sah dan telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yang berbunyi: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara

Dalam suatu tindak pidana unsur merupakan tolak ukur yang penting untuk dapat menganalisa apakah perbuatan tersebut termasuk perbuatan pidana atau tidak. Majelis hakim Pengadilan Negeri Kalianda menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan unsur-unsur berikut:
1. Unsur “Setiap orang”, yang berarti orang perseorangan.
Kata setiap orang pada dasarnya merujuk pada subjek hukum sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang bertanggung-jawaban atas segala tindakannya. Dalam perkara ini terdakwa Khoirul Anwar bin Mat Juani sesuai dengan namanya tertera dalam surat dakwaan penuntut umum yang telah disampaikan secara lengkap dalam persidangan.

3. Unsur “Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, unsur ketiga ini berhubungan dengan unsur kedua yaitu “membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, yang semuanya dalam ruang lingkup nafsu birahi. Berdasarkan fakta dalam persidangan, terdakwa dan korban melakukan tindakan berciuman, tangan terdakwa meraba payudara korban, dan terdakwa juga memegang kemaluan korban begitu juga dengan korban yang memegang kemaluan terdakwa, maka hal ini dapat dikatakan sebagai perbuatan cabul.

[illegible]

Jika dilihat dari ancaman pidana, pasal yang didakwakan terhadap terdakwa merupakan pasal yang terdapat ketentuan yang mengatur tentang adanya pidana minimum khusus (straf minima) yaitu undang-undang telah menetapkan sendiri batas maksimum dan minimum sanksi dari suatu tindak pidana. Dalam hal ini hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di bawah dari sanksi pidana minimum yang ditetapkan undang-undang. Akan tetapi penjatuhan pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 177/Pid.B/2020/PN.Kla dengan putusan pidana 3 (tiga) tahun penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara. Dengan putusan tersebut hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan batas minimum yang diatur dalam Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang yakni pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Majelis hakim juga mempertimbangkan adanya ketentuan mengenai dimungkinkannya untuk menjatuhkan pidana di bawah minimum undang-undang yaitu dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Dalam rumusan pleno kamar pidana pada poin kelima tentang penjatuhan pidana minimal terhadap tindak pidana anak dan orang dewasa tetapi korbannya adalah anak, bahwa apabila pelakunya sudah dewasa sedangkan korbannya adalah anak maka dilihat secara kasuistik majelis hakim dapat mrenjatuhkan pidana di bawah minimal dengan pertimbangan:

- Menurut majelis hakim, syarat dalam pertimbangan pertama memiliki dua bagian yang bersifat alternatif yaitu *pertama*, adanya perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara pelaku/keluarga pelaku dengan korban/keluarga korban, dengan tidak

saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban, atau yang *kedua*, perbuatan dilakukan suka sama suka. Jika dicermati, fakta yang terungkap di persidangan menyatakan bahwa perbuatan terdakwa dan korban telah memenuhi kriteria sebagai perbuatan yang dilakukan secara suka sama suka. Sedangkan dalam konteks perdamaian, di antara keluarga terdakwa maupun keluarga korban belum terdapat perdamaian secara tertulis. namun demikian, antara terdakwa dan korban justru kompak dan menunjukkan bahwa mereka berpacaran dan melakukan perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, berbeda dengan keluarganya yang ngotot menyatakan bahwa telah terjadi persetubuhan antara terdakwa dan korban yang mana hal ini bertolak belakang dengan pengakuan terdakwa dan korban bahwa mereka tidak pernah melakukan persetubuhan. Dengan demikian majelis hakim berpendirian bahwa pembedaan bukan satu-satunya solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi dan pembedaan yang berlebihan bukan keadaan hal yang dibutuhkan untuk memulihkan korban, melainkan pendampingan dan pemberian informasi yang cukup mengenai kesehatan reproduksilah yang lebih dibutuhkan korban termasuk juga terdakwa. Oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan akan menjatuhkan pidana yang menurutnya sesuai dengan perbuatan terdakwa dan adil bagi terdakwa maupun korban. Majelis hakim dengan ini menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan cabul

terhadap anak” dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur pada Putusan Nomor 177/Pid.B/2020/PN.Kla

Dalam pandangan islam tidak disebutkan ketentuan mengenai pencabulan melainkan hanya ketentuan terkait zina, dan sudah jelas islam melarang perbuatan zina dilakukan. Sebagaimana Al-Quran Surat Al-Israa ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”. (Q.S. al-Israa (17):32)

Dan sanksi zina dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nuur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَتَدَّ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. (Q.S. an-Nuur (24):2)

Ayat ini mengartikan bahwa Allah tidak akan menghukum hambanya jika belum sampai risalah kepadanya melalui para Rasulnya. dari Anas ra:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ فِي تِهْمَةٍ

Artinya: “Bahwa rasulullah SAW pernah menahan (memenjarakan) seseorang di daerah Tihamah”

Hadis ini mengartikan bahwa Rasulullah pernah melakukan dan memerintahkan ta'zir.

⁵³ Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), 18.

Mengenai kadar sanksi *ta'zir* hal ini merupakan kewenangan penguasa untuk menetapkan ukurannya, dan ini juga bergantung pada zaman, tempat, dan kasus yang terjadi. Dalam Putusan Nomor 177/Pid.B/2020/PN.Kla terdakwa dijatuhi hukuman penjara dan denda. Sanksi penjara tidak memiliki batas maksimal secara mutlak. Rasulullah

[illegible]

SAW telah menjatuhkan sanksi penjara, namun beliau tidak menetapkan batas waktu tertentu. Dengan begitu, hukuman penjara tetap berlaku mutlak. Sedangkan sanksi denda dalam islam disebut dengan *ghuramah* atau ganti rugi. kadar ganti rugi diserahkan kepada hakim (penguasa).

Penulis berpendapat bahwa sanksi yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 177/Pid.B/2020/PN.Kla sudah sesuai dengan syariat islam dengan menerapkan sanksi *ta'zir*, karena dalam islam terdapat ketentuan mengenai jarimah *ta'zir* dan jenis maupun kadar sanksi jarimah *ta'zir* tidak ditentukan secara pasti melainkan sepenuhnya diserahkan kepada hakim (penguasa). Yang dalam hal ini hakim menjatuhkan sanksi penjara dan denda terhadap terdakwa. Dengan demikian, penjatuhan hukuman yang sesuai bagi pelaku kejahatan kesusilaan seperti pencabulan diharapkan dapat memberikan efek jera, tidak hanya terhadap terdakwa saja melainkan juga untuk orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari maupun perbuatan pidana lain yang melanggar hukum. Serta memberikan rasa aman terhadap masyarakat terutama anak yang merupakan generasi penerus bangsa yang wajib dilindungi.

PENUTUP

Dari beberapa uraian dan analisis penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 92

pertimbangan khusus. Dengan ketentuan ini hakim Pengadilan Negeri Kalianda mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana di bawah minimum Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

2. Berdasarkan analisis hukum pidana islam, sanksi yang diberikan terhadap terdakwa sudah sesuai dengan hukum islam dengan menerapkan sanksi *ta'zir* dimana kadar sanksinya tidak ditentukan dalam *nash* akan tetapi sepenuhnya diserahkan kepada hakim. Dalam perkara ini, majelis hakim memberikan sanksi *ta'zir* berupa hukuman penjara dan denda. Karena perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori pelanggaran terhadap kehormatan yang dikenai sanksi *ta'zir*. Oleh karenanya majelis hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa sebagai wujud pertanggung-jawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

B. Saran

1. Untuk aparat penegak hukum khususnya hakim hendaknya memutus suatu perkara berdasarkan dengan undang-undang, agar setiap putusan dapat memberikan keadilan dan efek jera bagi pelaku tindak pidana dan masyarakat. Serta diharapkan para penegak hukum dapat menindaklanjuti secara tegas setiap tindak pidana kesusilaan terhadap anak di bawah umur yang marak terjadi.

- sejak dini. Agar setiap anak memiliki pemahaman yang da
jadikan sebagai tameng agar terhindar dari kejahatan kesusila
perlindungan terhadap anak dapat benar-benar diteg

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maliki, Abdurrahman. *Sistem Sanksi dalam Islam*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.
- Hasan, Hamzah. *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jina'iyah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*. Palembang: CV Amanah, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
- Naja, Daeng. *Woeker Ordonante Riba Dalam Hukum Positif*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Nurkholis. "Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-undang dan Hukum Islam". *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 8 No. 1 Juni, 2017.
- P.A.F Lamintang. *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Rohman, Abdul dkk. "Analisis Terhadap Putusan yang Menjatuhkan Sanksi Pidana di Bawah Minimal (Studi Putusan Nomor: 284/Pid.sus/2017/PN.Kka)". Vol. 2. Agustus, 2020.
- Sahid. *Epistimologi Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
- Shovia Hasanah, "Pelaku Persetubuhan karena Suka Sama Suka, Bisakah Dituntut?". <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50692e475ef42/persetubuhan-anak-dibawah-18-tahun-dengan-orang-dewasa/>, (4 Juli 2021).
- Silitonga, David Casidi dan Muaz Zul. "Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai)". *Jurnal Mercatoria*, Vol. 7. No. 1. Juni, 2014.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya: Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1991.
- Tim Pustaka Buana. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. T.tp,: Pustaka Buana, 2016.

